



## COVID 19 and Gender

COVID-19 telah mengubah dinamika berbagai hal di kehidupan kita termasuk dalam bidang gender. Salah satu masalah utama yang dihadapi perempuan ditengah pandemi adalah meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga secara drastis. Keamanan bagi perempuan di ruang publik juga menjadi salah satu masalah yang perlu diperhatikan ditengah menurunnya aktifitas masyarakat. Selain itu, dengan diberlakukannya berbagai pembatasan aktifitas ekonomi, perempuan menjadi salah satu pihak yang terdampak paling parah dikarenakan menurunnya tingkat pendapatan dan meningkatnya kebutuhan domestik keluarga yang menjadi tanggungan mereka. Statistik juga menunjukkan bahwa selama berlangsungnya pandemi, tingkat kehamilan di berbagai negara telah meningkat. Berbagai persoalan tersebut mendesak berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan kelompok masyarakat untuk lebih memperhatikan kesejahteraan dan keamanan perempuan selama berlangsungnya pandemi COVID-19. Maka dari itu, United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) bersama United Nations Development Programme (UNDP) menggelar webinar berjudul "COVID-19 and Gender" sebagai sebuah wadah untuk mendiskusikan dampak dari COVID-19 terhadap masalah gender.

**Stephany Uy-Tan** sebagai *City Councillor of Catbalongan, The Philippines* dan *Co-chair of UCLG ASPAC Standing Committee on Woman in Local Government* membuka webinar ini dengan menyebutkan bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah hal yang instrumental dalam penanganan COVID-19 dan penyelenggaraan transisi kebijakan New Normal

*COVID-19 is changing the dynamics of many aspects of our live, including the already much discussed realm of gender. The quarantine and the economic lockdown have caused trouble for many, but more so to the vulnerable groups including women. During the quarantine, there have been an increase of report on domestic violence. The issue of safety of women in public spaces have also been raised to attention as people less and less having activity outdoor. With the economic activity limitation taking effect as soon as the pandemic begin to spread worldwide, women become one group that have been badly impacted with the fall of family income and the increasing need to household supply due to health concern. At the same time, statistics also shows the increase of pregnancy in many countries during the quarantine. All these problems and concerns forces stakeholders including the frontliners at local governments and CSOs to provide more care and attention the raised issue of women needs during pandemic. In the spirit of addressing this issue, United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) in cooperation with United Nations Development Programme (UNDP) conducted a webinar discussing "COVID-19 and Gender" as a platform for policymakers and other stakeholders to discuss the impact of COVID-19 on the issue of gender.*

**Stephay Uy-Tan** as the *City Councillor of Catbalongan, The Philippines* dan *Co-chair of UCLG ASPAC Standing Committee on Woman in Local Government* opened the webinar by mentioning that gender equality and women empowerment are instrumental in mitigating the impact of COVID-19 and the transition into the new normal policy. With all the challenges and problems in government sector amidst the pandemic situation, we should keep in mind that gender inclusive policy is

Dengan berbagai masalah dan tantangan dalam bidang pemerintahan pada saat berlangsungnya pandemi, beliau mengingatkan bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk menyadari bahwa kebijakan yang inklusif adalah sebuah hal yang penting untuk kesejahteraan. COVID-19 berdampak kepada diskriminasi kepada perempuan di berbagai bidang. Beberapa minggu setelah pandemi mulai menyebar ke seluruh dunia, laporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga meningkat drastis yang disebabkan oleh meningkatnya ketegangan di rumah. Selain itu, masalah kesehatan seksual dan reproduktif juga perlu diperhatikan mengingat berkurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan. Beberapa masalah yang telah disebutkan berdampak pada berkurangnya pendapatan keluarga yang kebanyakan ditanggung oleh perempuan.

Sambutan Kedua diberikan oleh **Patrick Duong** sebagai perwakilan UNDP yang bekerja sama dengan UCLG ASPAC dalam penyelenggaraan webinar ini. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah berperan penting dalam upaya mitigasi COVID-19. Berbagai kebijakan dan tindakan yang diambil pemerintah daerah harus berperinsip inklusif. Beliau juga menyebutkan bahwa perempuan menjadi pusat pergerakan dalam penanganan COVID-19 serta di masyarakat dalam bertahan dari pandemi. Webinar ini menjadi permulaan dan hanya puncak gunung es yang perlu digali lebih dalam melalui diskusi dan perencanaan tindakan yang lebih konkrit. Hal lain yang beliau sampaikan adalah meningkatnya ketidaksetaraan gender ditengah pandemi di seluruh dunia. Ditambah lagi dengan kolapsnya berbagai bisnis yang digerakan oleh perempuan yang berdampak tidak hanya perempuan tersebut, namun juga kepada keluarga yang ia topang. Terlepas dari itu, COVID-19 menjadi sebuah kesempatan untuk para pemangku kepentingan untuk membangun kembali bidangnya masing-masing dengan memperhitungkan aspek gender agar berbagai masalah yang dihadapi kelompok rentan tidak lagi terjadi.

**Khara Jabola-Carolus** sebagai *Executive Director of Hawai'i State Commission on the Status of Women* menjadi narasumber pertama. Sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah yang mengimplementasikan kebijakan dana pemulihan covid-19 feminis, beliau menyebutkan pentingnya sebuah kebijakan yang secara tegas berhaluan feminis untuk menghindari ketimpangan dan diskriminasi sistemik. Selain itu, beliau juga menyebutkan bahwa salah satu masalah yang banyak dijumpai di berbagai negara demokrasi di seluruh

*important for general welfare. One of the impacts of the pandemic is the discrimination to women in all sectors; a few weeks after the pandemic begin to spread around the world there were an increase of reports of domestic violence caused by tension inside the house. Not to mention the problem of reproductive health that have been hampered as the current crisis limits access to health facilities. All these problems can lead to the fall of family income that mainly supported by women.*

*The second opening remarks was made by **Patrick Duong** as the representative of UNDP that worked together with UCLG ASPAC in conducting this webinar. He mentioned that local governments hold an important role in mitigating COVID-19. In doing so, all the policy that local governments undertake should be based on inclusivity. He also stated that women are the center of the movement in handling COVID-19 while also keeping its role in defending its community from the disease. The webinar was a starting point and merely the tip of the iceberg in uncovering the problems and potential solutions. The discussion needs to be taken into further planning and concrete action afterwards. With the collapse of women-run business in many countries impacted by COVID-19, it also reflected in decrease of income for the family they support. Despite all that, COVID-19 is an opportunity for stakeholders and decision makers to build back better while keeping the gender aspect in mind so those problems does not repeat once the pandemic over.*

**Khara Jabola-Carolus** as the *Executive Director of Hawai'i State Commission on the Status of Women* was the first speaker. As a part of the first local government that implement *Feminist COVID-19 Recovery Fund*, she mentioned that it is important to outright implementing policy based on feminism to hinder the systemic discrimination caused by rooted patriarchal structure. Another problems that is currently they are trying to tackle is the exploitation of the pandemic situation to undermine democratic process. The government needs to work with all level of governments, from the federal level all the way down to the state and county or municipal level while identifying women leaders beyond the formal settings, but also the activist or grass-root community organizer who have worked hard via internet and in the field in providing supplies for those who need it. At the state level, there is a program called "*Feminist COVID Response Team*" with focus on tracking problems faced by women such as reproductive health, landlords exploitation to tenants who cannot pay their rents, sexual trafficking, and women labour exploitation. After all the trackings, the result will be given to the state's legislator who will decide how to directs funding from the federal governments. Learning from the past experiences in



dunia adalah pemanfaatan bencana pandemi sebagai alasan untuk mengesampingkan proses demokrasi. Menurut Jabola-Carolus, pemerintah perlu bekerja secara langsung bersama seluruh level pemerintah, mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah lokal serta mengidentifikasi tokoh dan para pemimpin perempuan, tidak hanya yang secara formal menjabat di pemerintahan dan sektor lain, namun juga yang bekerja diluar sektor formal, seperti aktivis, tokoh masyarakat dan komunitas di tingkat akar-rumput yang telah bekerja keras menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi kelompok rentan melalui internet walaupun secara langsung di lapangan. Di tingkat negara bagian, terdapat sebuah gerakan yang bernama Feminist COVID Response Team dengan fokus melakukan pelacakan berbagai masalah yang dihadapi perempuan selama terjadinya pandemi, seperti kesehatan reproduksi, eksploitasi peenyewaan, perdagangan seks, dan eksploitasi buruh perempuan. Setelah itu, berbagai kasus yang telah dilacak diberikan kepada legislator negara bagian yang memutuskan bagaimana mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Belajar dari berbagai bencana yang pernah terjadi sebelumnya di Hawai'i, Jabola-Carolus menyatakan bahwa solusi dan proses pemulihan perlu mulai direncanakan disaat bencana tersebut terjadi, alih-alih setelah bencana selesai terjadi.

Sebagai salah satu upaya *Building Back Better*, sudah terdapat beberapa upaya pemulihan COVID-19 dengan fokus perempuan. Ditengah tekanan pandemi, berbagai elemen pemerintah termasuk birokrat mulai mempertanyakan struktur ekonomi yang secara inheren mengesampingkan perempuan dan kelompok rentan. Dengan begitu, salah satu upaya yang perlu kita lakukan tidak hanya berfokus kepada

*experiences in Hawai'i. Jabola-Carolus states that solution for mitigation should begin to be formulated as the disaster happening, instead of after the disaster happen.*

*As the effort to building back better, there have been several actions of COVID-19 recovery that are centred around women. Amidst the pressure of pandemic situation, many bureaucrats and other elements of the population begin to question the structure of the current economy that inherently putting aside women and other disadvantaged groups. Therefore what we can do now instead focusing on safety net that is built for those groups that are fundamentally vulnerable, we should also strengthen the structure of livelihood by providing universal basic income. Another important aspect is planning the economy that have collapse because of the pandemic. The economic that will be rebuilt should be oriented towards the needs of women.*

**Chong Eng** as the Penang Exco for Women and Family Development, Gender Inclusiveness and Religions Other Than Islam shared her experiences on what Penang have done as the effort to mitigate the impact of COVID-19. Penang has 10 years program oriented towards family named Family Focused Smart and Green State Inspire the Nation. Other than that, last year, Penang has just adopted a policy on gender inclusivity. The two policy have helped Penang in improving gender equality. As an example, gender based violence have become under spotlight in Penang and Malaysia. This was an opportunity for the government and NGO to adopt a Family Safety Policy to improve support for the victims of domestic violence. Despite that, actions taken remains to be slow. Even before the pandemic, victims do not report their cases to the authority, and the pandemic worsened the situation. The government of Penang provides support points for the victims of domestic abuse. Victims

jaring keamanan sosial yang dibuat untuk kelompok yang rentan, kita juga perlu memperkuat struktur kehidupan dengan menyediakan Universal Basic Income. Aspek penting lainnya adalah merencanakan bagaimana ekonomi pasca pandemi dibangun kembali. Tidak hanya membangun kembali ekonomi yang telah jatuh karena pandemi, ekonomi yang dibangun kembali harus berorientasi kepada kebutuhan perempuan.

**Chong Eng** sebagai *Penang Exco for Women and Family Development, Gender Inclusiveness and Religions Other Than Islam* membagikan pengalaman apa yang Penang sudah lakukan sebagai upaya mitigasi COVID-19. Penang memiliki program 10 tahun yang berorientasi kepada pengembangan keluarga bernama Family Focused Smart and Green State Inspire the Nation. Selain itu, pada tahun lalu, Penang baru saja meloloskan sebuah kebijakan mengenai inklusivitas gender. Kedua kebijakan tersebut telah membantu Penang untuk meningkatkan kesetaraan gender. Sebagai contoh, kekerasan berbasis gender menjadi sorotan di Malaysia dan di Penang. Hal ini menjadi kesempatan bagi pemerintah dan NGO untuk menyusun sebuah kebijakan *Family Safety Policy* untuk meningkatkan dukungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun begitu, langkah yang diambil masih lambat. Padahal, bahkan pada saat-saat sebelum pandemi, banyak korban kekerasan tidak mampu melaporkan kasusnya. Pandemi tentu memperparah keadaan tersebut. Disaat COVID-19, pemerintah Penang membuat support point bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Para korban yang melapor selanjutnya akan mendapatkan perawatan kesehatan dan kasusnya dapat proses oleh pihak yang berwajib. Selain itu, pemerintah juga berkoodinasi dengan organisasi keagamaan sebagai salah satu pihak pertama yang dapat menolong korban kekerasan dalam rumah tangga. Kedua kebijakan tersebut telah membantu penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dan disaat yang bersamaan tidak berbiaya mahal bagi pemerintah. Kebijakan lainnya adalah untuk memberikan dana bantuan langsung kepada perempuan, alih-alih kepada laki-laki sebagai kepala keluarga. Hal ini untuk mencegah penggunaan dana bantuan yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan keluarga untuk kebutuhan lain.

Pembicara selanjutnya, **Stephany Uy-Tan** sebagai *City Councillor of Catbalongan* membawakan presentasi yang berjudul *Women's Role in the Pandemic; Catbalongan City's Experience*. Di Catbalongan, terdapat *Barangay (desa/kecamatan) Health Emergency Response Team* yang kebanyakan dari anggotanya adalah perempuan sehingga tindakan

*will receive medical attention and their cases will be process by the authority. The government also works with religious organizations that might become the first safe house to help the victims of abuse. The two policies have helped the handling of the victims of domestic violence without costing the government too much. Another policy is by providing funding to the women instead of men as the head of the family. This is to prevent the funding being used for another things.*

The next speaker, **Stephany Uy-Tan** as the *City Councillor of Catbalongan* talked about *Women's Role in the Pandemic; Catbalongan City's Experience*. In *Catbalongan*, there are *Barangays Health Emergency Response Team* which most of the members are women and so helped to make women centered decision. Also, most of the member of *The Inter-agency Task Force for COVID-19 recovery* are also women. The government is also actively participating in monitoring the need of families and women by distributing foods and health supplies. The city council also ensure that at least 50% of its members are females, with their important roles in the process of planning, implementation, and to evaluation. Using family ID card, the government is actively tracking the number of pregnant mothers, single mother, children, and infants. Many programs are also designed to empower women by funding the women cooperatives organizations to produce face mask which the distributed throughout the city, the implementation of e-market to fulfill the demands of women at home without making them to go to the market, and also priority to women in public transportations.

The last speakers, **Cao Yanping**, *Secretary-general of Xi'an People's Friendship Association with Foreign Countries* stated that the government of Xi'an has a policy named *Chinese Women's Development Framework* which serve as the main benchmark for women development. Apart from that, there are various other legal instrument to measure gender equality. Secondly, Government and NGOs worked together to produce policy for the welfare of women such as providing 150 days maternal leave and 15 days for the accompanying partner. At many forums in the government such as the city council, the number of women representatives is increasing from year to year which led to many new policies were adopted by women to protect women's rights. During the pandemic, Women are given extra attention and support such as support for breastfeeding mother and 24 hours hotline for psychological and legal consultation to help women to protect their rights.



yang diambil fokus terhadap kebutuhan perempuan. Selain itu, kebanyakan anggota Gugus Tugas Antar Lembaga Penanganan COVID-19 adalah perempuan. Selain itu, pemerintah juga secara aktif berpartisipasi untuk memantau kebutuhan keluarga dan perempuan serta mendistribusikan bantuan makanan dan kebutuhan kesehatan. Pemerintah juga memastikan perempuan berpartisipasi di berbagai dewan (council) sehingga suara dan kebutuhan perempuan dapat difasilitasi. Di Dewan Kota Catbalongan, 50% dari anggotanya adalah perempuan, dan mereka berperan penting dalam proses perencanaan, implementasi, hingga tahap evaluasi. Dengan menggunakan kartu identitas untuk keluarga, pemerintah juga secara aktif mendata jumlah perempuan hamil, ibu tunggal, anak-anak, ataupun balita. Berbagai program pemberdayaan perempuan juga dilaksanakan pemerintah seperti pemberdayaan koperasi perempuan untuk membuat masker yang akan didistribusikan ke seluruh warga Catbalongan, penggunaan e-market agar perempuan dapat berbelanja kebutuhan tanpa harus keluar rumah, serta prioritas bagi perempuan di transportasi umum.

Pembicara terakhir, **Cao Yanping**, *Secretary-general of Xi'an People's Friendship Association with Foreign Countries* menyebutkan bahwa pemerintah Xi'an mempunyai kebijakan Chinese Women's Development Framework yang menjadi acuan pembangunan bagi perempuan. Selain itu terdapat juga berbagai instrument legal untuk mengukur kesetaraan gender. Yang kedua, pemerintah dan NGO telah bekerja sama dengan untuk menghasilkan kebijakan untuk kesejahteraan perempuan seperti kebijakan 150 hari cuti hamil dengan 15 hari cuti bagi pasangan perempuan untuk membantu ibu yang baru melahirkan. Di berbagai forum, seperti dewan perwakilan di tingkat kota, jumlah perwakilan perempuan terus bertambah, sehingga banyak kebijakan baru yang telah disusun oleh perempuan untuk melindungi hak-hak mereka. Di masa pandemi, perempuan akan diberikan perhatian lebih dengan disediakannya berbagai fasilitas seperti bantuan kepada ibu menyusui dan hotline 24-jam untuk konsultasi psikologi dan hukum untuk melindungi hak-hak perempuan.